

“20 Mei 2002? Mengapa Tidak?”

Di Majelis Konstituante terjadi debat tentang kesiapan rakyat untuk penyerahan kedaulatan 20 Mei 2002. Berikut komentar dari masyarakat yang dihimpun Nina Marques.

• • •

Lita Maria, seorang ibu dari satu putra mengatakan bahwa transisi Timor Lorosae sudah berlangsung dua tahun. Sekarang ini transisi memasuki tahap kedua, dimana terjadi Timorisasi [orang internasional digantikan oleh orang Timor, *Red.*]. Dalam tahap kedua ini juga diterapkan demokrasi berupa pemilu yang bebas untuk memilih anggota-anggota Majelis Konstituante, yang sekarang menyusun konstitusi Timor Lorosae. Dengan demikian, katanya, “Orang Timor Lorosae juga sudah mempersiapkan diri untuk mengurus negaranya sendiri, bukan hanya tergantung pada orang lain.”

Lulusan Akademi Perawat (AKPER) yang setiap hari mengurus rumah tangganya ini juga mengatakan bahwa dengan pemindahan kekuasaan itu ia berharap para pemimpin memperhatikan rakyat. “Para *lider* harus memperhatikan nasib orang-orang yang sampai sekarang belum menda-

patkan pekerjaan. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, tengoklah ke belakang,” katanya kepada *Cidadaun* di rumahnya di Tuana Laran, Dili. “Kepada mereka yang sudah disiapkan UNTAET dengan mengikuti training dan sebagainya, saya berharap agar dapat menyampaikan apa yang mereka tahu kepada yang belum tahu. Sehingga kita dapat bersama-sama membangun Timor Lorosae,” lanjutnya.

“Kalau kita sudah memiliki basis yang kuat, apa salahnya kita menerima tanggal tersebut! Asal ingat, jangan berkonsentrasi di kota Dili! Masih ada 12 distrik lain, yang perlu diperhatikan adalah masyarakat di basis,” kata Licinio Branco, yang bekerja pada ICE, di Same, Distrik Maunfahe. “Saya pribadi berpendapat yang penting dilihat bukan lambat atau cepatnya UNTAET menyerahkan kekuasaan kepada kita sendiri. Namun saya melihat dari segi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam kita. Penyerahan kekuasaan artinya



Apa arti kemerdekaan bagi anak-anak jalanan?

• • •

kita memasuki kemerdekaan. Kemerdekaan bukan saja kita bebas dari penjajah tetapi kita juga harus melihat jauh ke depan dari segi pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sebagainya,” katanya kepada *Cidadaun* saat baru tiba di Dili untuk mengikuti suatu pelatihan.

Pandangan yang senada dikemukakan oleh Maria José Antonieta, 19 tahun, mahasiswi baru Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UNATIL. “Kalau masyarakat dan terutama para *lider* sudah siap mengapa tidak? Ini merupakan kesempatan yang baik untuk orang Timor Lorosae agar dapat membangun negaranya sendiri. Jangan hanya tergantung pada orang lain,” katanya.

Ia juga berharap agar para pemimpin memperhatikan lapangan kerja bagi rakyat agar mereka bisa hidup layak dan memperhatikan pendidikan untuk pemuda-pemudi yang tidak mendapat sekolah. “Kami tidak mau menderita lagi. Saya khawatir kalau nanti negara donor tidak membantu kita lagi. Ini semua kembali pada pejabat pemerintah Timor Lorosae, bagaimana mereka dapat mencari jalan keluar agar kekhawatiran ini tidak terjadi. Juga bagaimana ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lancar sehingga mereka tidak susah,” kata gadis yang biasa dipanggil Mize ini ketika ditemui *Cidadaun* di Comoro, Dili. •

• KONSTITUSI •

Pemilu dan Partisipasi Politik

Rakyat menghendaki partisipasi politik tidak sebatas pemilu saja. Berikut ini rangkuman Dialog Konstitusi Yayasan HAK dan Fokupers.

• • •

Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan untuk memperkuat legitimasi bagi kekuasaan negara sebagai perwakilan rakyat. Prinsip penyelenggaraan dan ketentuannya perlu diatur dalam konstitusi, sehingga tidak terjadi kesimpang-siuran dan perubahan yang membingungkan. Pemilu sebaiknya diatur dan dilaksanakan oleh badan independen dan berkuasa penuh, artinya memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan pelaksanaan proses pemilu tersebut.

Partisipasi politik bagi rakyat itu sangat penting dan mendesak. Konstitusi perlu menjabarkan prinsip demokrasi langsung atau partisipatif ini lebih jauh, dan tidak hanya mengandalkan pemilu sebagai satu-satunya mekanisme penentu kehendak rakyat. Kelemahan demokrasi pemilu (*electoral democracy*) ditunjukkan oleh peserta diskusi,

... jika suatu saat ada partai yang mendominasi di Majelis Konstituante yang telah terbentuk, maka dengan sendirinya partai tersebut dapat mengubah apa yang telah ditentukan bersama.

Masalah ini perlu diatur secara khusus dalam sebuah regulasi yang bersifat baku untuk setiap partai politik agar jangan terjadi hal demikian.

Kekhawatiran lain yang sudah disebutkan sebelumnya adalah kemungkinan lahirnya demokrasi pemilu yang hanya menguntungkan kalangan elit, karena kekuatan-kekuatan politik non-partai diabaikan atau tidak mendapat tempat dalam sistem seperti itu. Tentu prinsip demokrasi langsung ini perlu diimbangi pemberian informasi dan pendidikan politik yang cukup sehingga terjadi dialog yang terarah dalam setiap pengambilan keputusan. Keterlibatan rakyat juga tidak hanya sebatas ucapan, tapi perlu dicantumkan dalam konstitusi. Berikut harapan seorang peserta,

Dalam proses pembuatan konstitusi Timor Lorosae saat ini telah ada sebuah mekanisme yang menampung semua aspirasi rakyat. Itu merupakan awal yang baik bagi pembangunan demokrasi ke depan, tetapi bagaimana kita menjamin bahwa ide dari rakyat itu akan benar-benar dimasukkan dalam konstitusi?

... Upaya apa yang perlu dilakukan agar

masyarakat dapat berpartisipasi dengan lebih mendalam keterlibatannya di dalam proses tersebut serta merasa ikut memiliki dan bertanggungjawab terhadap konstitusi itu sendiri?

Untuk Majelis Konstituante diharapkan bahwa pada saat sebelum dibahasnya masalah menyangkut badan tersebut, diperlukan partisipasi rakyat. Mereka harus mencari mekanisme yang pas agar rakyat dapat dilibatkan secara menyeluruh dalam proses tersebut.

Dorongan agar rakyat dapat berpartisipasi langsung ini antara lain disebabkan keraguan terhadap kekuatan politik formal (partai politik) yang ada. Trauma masyarakat akan kejadian masa lalu tidak dapat diingkari. Seperti diungkapkan seorang peserta,

Pada tahun 1975 hanya ada lima partai dan hal itu membuat kita menjadi hancur berantakan. Namun setelah Timor Lorosae pisah dengan Indonesia dan menyatakan diri merdeka muncul banyak partai baru yang sekarang berjumlah 16 partai. Fenomena ini masih merupakan sebuah tanda tanya akan kedamaian dan ketenteraman dalam kancah perpolitikan Timor Lorosae.

Peserta berulang kali mengingatkan perlunya klarifikasi sejarah mengenai keterlibatan partai-partai politik dalam masa pendudukan dan perang melawan Indonesia. Dalam kerangka konstitusi dapat dipikirkan rumusan mengenai partai politik, perumusan kriteria mendirikan partai, pembatasan terhadap organisasi politik yang jelas-jelas mengancam keselamatan bersama. Pembatasan ini hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditafsirkan sewenang-wenang oleh pemegang kuasa, seperti yang terjadi semasa pendudukan Indonesia. Masalah lain

yang secara implisit disinggung adalah sumber dana dan pembiayaan partai-partai politik. Konstitusi mungkin perlu mencantumkan ketentuan yang membatasi partai-partai sedemikian rupa sehingga memperkecil atau meniadakan kemungkinan dukungan dari luar partai atau luar negeri yang justru dapat mengganggu keberadaan Timor Lorosae sendiri.

Di samping berbagai kekhawatiran di atas, dorongan untuk melihat adanya mekanisme demokrasi langsung atau partisipatif, berasal dari pengalaman rakyat menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri di tingkat basis atau komunitas dengan kerangka budaya masing-masing. Karena itu sebagian berharap agar nilai, kebudayaan, dan kebiasaan Timor Lorosae harus dipikirkan dalam perumusan mekanisme tersebut, sehingga benar-benar bisa berfungsi dengan efektif. Seperti dikatakan seorang peserta,

Konstitusi Timor Lorosae nanti harus memberi pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan serta kesempatan kepada institusi-institusi masyarakat adat yang ada di Timor Lorosae untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial.

Cukup jelas bahwa rakyat pada dasarnya menghendaki sistem yang lebih terbuka dan tidak tergantung pada pemilihan umum, serta tidak menunggu pemerintah atau parlemen menyelesaikan segala persoalan. Karena keadaan seperti itu juga cenderung menghambat dan bahkan mematikan kreativitas rakyat untuk membantu mencari jalan keluar terbaik bagi bangsa ini. •

Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum yang berlaku di Timor Lorosae pada masa transisi adalah sistem hukum Eropa Kontinental. Apa ciri dan dari mana asalnya?

• • •

Sistem hukum Eropa Kontinental punya hubungan dengan sistem hukum yang berlaku di Timor Lorosae pada masa transisi ini. Sistem hukum yang juga dikenal dengan nama *Civil Law* ini berasal dari Romawi yang kemudian berkembang ke Prancis. Perkembangannya diawali dengan pendudukan Romawi atas Prancis. Pada masa itu sistem ini dipraktikkan dalam interaksi antara kedua bangsa untuk mengatur kepentingan mereka. Proses ini berlangsung bertahun-tahun, sampai-sampai negara Prancis sendiri mengadopsi sistem hukum ini untuk diterapkan pada bangsanya sendiri.

Bangsa Prancis membawa sistem ini ke Negeri Belanda, dengan proses yang sama dengan masuknya ke Prancis. Selanjutnya sistem ini berkembang ke Italia, Jerman, Portugal, Spanyol, dan sebagainya. Sistem ini pun berkembang ke seluruh daratan benua Eropa.

Ketika bangsa-bangsa Eropa mulai mencari koloni di Asia, Afrika, dan

Amerika Latin, sistem hukum ini digunakan oleh bangsa-bangsa Eropa tersebut untuk mengatur masyarakat pribumi di daerah jajahannya. Misalnya Belanda menjajah Indonesia. Pemerintah penjajah menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental untuk mengatur masyarakat di negeri jajahannya. Apabila terdapat suatu peristiwa hukum yang melibatkan orang Belanda atau keturunannya dengan orang pribumi, sistem hukum ini yang menjadi dasar pengaturannya. Begitu pula di Timor Lorosae. Selama kurang lebih empat abad di bawah kekuasaan Portugis dan seperempat abad pendudukan Indonesia, sistem hukum Eropa Kontinental yang berlaku.

Sekarang di bawah Pemerintah Transisi PBB (UNTAET), sistem hukum ini tetap diberlakukan di Timor Lorosae. Pasal 3 Regulasi UNTAET No. 1/1999 menyebutkan bahwa hukum yang berlaku di Timor Lorosae sebelum 25 Oktober 1999 tetap berlaku, sejauh ti-



Dialog Konstitusi Yayasan HAK & Fokupers di Baucau.

• • •

tidak bertentangan dengan standar internasional. Dengan demikian berarti sistem hukum Eropa Kontinental yang diberlakukan Indonesia tetap berlaku.

Hal yang membedakan sistem *Civil Law* dengan sistem *Common Law* (yang juga disebut sistem Anglo-Saxon) adalah, pertama, pada *Civil Law* dikenal apa yang dinamakan "kodifikasi hukum". Artinya pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Contoh hukum yang sudah dikodifikasi dalam kitab undang-undang adalah Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Kitab-kitab di atas ditulis dan disusun oleh pemerintah kolonial Belanda dan diberlakukan di Indonesia sampai sekarang. Kedua, sistem hukum Eropa Kontinental tidak mengenal adanya juri di pengadilan. Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara selalu adalah majelis hakim (panel), yang terdiri dari tiga orang. Kecuali untuk kasus-kasus ringan dan kasus perdata, yang menangani bisa hakim tunggal. •

Silverio Pinto Baptista

Mengenal Tiga Sistem Pemilu

Pemilu yang merupakan salah satu sarana demokrasi mengenal tiga sistem. Berikut ini uraian ringkas mengenai ketiga sistem itu.

• • •

Pemilu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif yang berwenang menyusun undang-undang maupun pejabat pemerintah. Secara umum dikenal tiga sistem pemilu, yaitu sistem perwakilan distrik, perwakilan proporsional, dan sistem campuran.

Sistem Perwakilan Distrik

Disebut sistem distrik karena wilayah suatu negara dibagi ke dalam distrik (daerah) pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan yang dikehendaki. Misalnya, jumlah anggota dewan ditentukan 50 orang maka wilayah negara itu dibagi menjadi 50 distrik pemilihan. Kadang-kadang sistem ini dinamakan sistem mayoritas karena untuk menentukan wakil rakyat dari suatu distrik ditentukan oleh siapa yang memperoleh suara yang paling banyak. Umpamanya, di suatu distrik, calon A memperoleh 5.000 suara, B memperoleh 4.500 suara, dan C memperoleh 2.500 suara, ma-

ka wakil dari distrik ini yang terpilih adalah A. Suara yang tidak terpilih tidak dapat digabungkan dengan suara dari distrik lain.

Kebaikan dari sistem ini adalah sebagai berikut. Pertama, calon dari distrik pemilihan adalah warga distrik tersebut sehingga dikenal oleh warga setempat. Kedua, karena calon tinggal di distrik tersebut maka lebih tahu kepentingan atau aspirasi warganya. Ketiga, ketika ia tidak melaksanakan aspirasi warga setempat maka warga yang memilihnya dapat memintanya mundur. Keempat, pelaksanaan pemilihan sistem ini sangat sederhana sehingga dalam penghitungan suara tidak rumit.

Pemilihan sistem distrik ini mengandung kelemahan. Pertama, kemungkinan wakil-wakil yang duduk di badan perwakilan hanya memperjuangkan kepentingan distriknya. Kedua, suara-suara yang tidak terpilih tidak dapat digabungkan dengan suara dari distrik lain. Ketiga, golongan minoritas tidak akan pernah terwakili di badan perwakilan rakyat. Keempat, jumlah partai sema-

kin berkurang dalam pemilu yang akan datang, partai yang memperoleh sedikit suara sulit bertahan.

Sistem Perwakilan Proporsional

Dalam sistem proporsional persentase kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap kursi disesuaikan dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Umpamanya jumlah pemilih yang sah pada pemilu adalah 1.000.000 dan jumlah kursi di badan perwakilan rakyat 100 kursi maka untuk satu kursi dibutuhkan 1.000 suara. Pembagian kursi di badan perwakilan rakyat tergantung pada berapa jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik peserta pemilu. Apabila sebagian penduduk tidak ikut dalam pemilu atau ada sebagian suara yang tidak sah maka persentase untuk satu kursi menjadi berubah.

Kebaikan dari sistem proposional, pertama, menguntungkan partai kecil karena memungkinkan terjadinya penggabungan suara. Kedua, tidak ada suara yang hilang. Ketiga, ada jaminan bahwa setiap suara yang diberikan akan ada wakilnya di badan perwakilan rakyat. Keempat, semua badan perwakilan akan bersifat nasional, tidak seperti sistem distrik yang lebih mengutamakan kepentingan daerah. Kelima, ada kecenderungan bertambahnya partai politik baru sebagai akibat dari perpecahan partai yang sudah ada.

Kelemahan sistem proporsional adalah pertama, perhitungan suara akan berbelit-belit, membutuhkan waktu

yang lama, dan biaya yang besar. Kedua, pemilih akan memilih partai politik bukan calon perseorangan, sehingga hubungan antara pemilih dan wakil-wakilnya di badan perwakilan tidak seerat dalam sistem distrik. Ketiga, ada kemungkinan pemilih tidak tahu siapa wakilnya di badan perwakilan rakyat, karena dalam pemilu pemilih hanya memilih partai politik. Keempat, kekuasaan partai politik sangat besar karena partai politik yang menentukan siapa-siapa calon partai politik untuk pemilu. Kelima, sistem ini akan menghasilkan anggota parlemen yang sangat bergantung kepada pimpinan partainya.

Sistem Campuran

Sistem ini merupakan gabungan dari sistem perwakilan distrik dan proporsional. Sistem ini telah dipraktikkan dalam pemilu 30 Agustus 2001 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Majelis Konstituante. Wakil nasional yang berjumlah 75 orang dipilih dengan sistem proporsional. Sedangkan wakil distrik yang berjumlah 13 orang dipilih dengan sistem distrik.

Pemilu hanyalah salah satu dari berbagai sarana demokrasi perwakilan. Untuk demokrasi sejati rakyat harus selalu memiliki kesempatan berpartisipasi dalam seluruh kehidupan bernegara, termasuk pengambilan keputusan mengenai masalah apapun. Unsur-unsur demokrasi langsung, seperti referendum sangat diperlukan, agar rakyat merasakan arti penting partisipasi politik. •

Silverio Pinto Baptista

Prinsip-Prinsip Pembangunan (1)

Yayasan HAK bekerjasama dengan Sahe Institute for Liberation pada tahun lalu menerbitkan buku kecil berjudul *Prinsip-prinsip Pembangunan Ekonomi Timor Lorosae*. Karya João Cravos ini ditulis sebagai makalah untuk lokakarya mengenai perjuangan setelah kemerdekaan Timor Lorosae yang diselenggarakan FORTILOS di Jakarta (1999). *Cidadaun* memuatnya secara bersambung menjadi empat bagian.

• • •

Pengantar

Tujuan utama kemerdekaan adalah meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Setiap orang setuju mengenai hal ini, tetapi ada teori-teori yang berbeda mengenai bagaimana mencapai tujuan ini. Karena peningkatan kesejahteraan rakyat erat hubungannya dengan pilihan strategi pembangunan ekonomi yang tepat, kita harus berpikir dengan hati-hati tentang apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi itu.

Ahli-ahli ekonomi konservatif cenderung berpendapat bahwa pembangunan ekonomi berarti peningkatan GNP (Gross National Product, Pendapatan Kotor Nasional) atau pendapatan rakyat semata. Namun, pendapat serupa ini sudah terbukti gagal menyelesaikan persoalan paling mendasar, yaitu bagaimana setiap orang yang menghuni suatu negara bisa menikmati kesehatan dan pendidikan yang layak.

Di lain pihak, kita juga tidak bisa seka-dar melontarkan pernyataan: "kita mau ekonomi rakyat, ekonomi yang adil"; kita harus bisa merumuskan dengan jelas dan spesifik metode apa yang bisa digunakan Timor Lorosae untuk memberikan peningkatan kesehatan, kemakmuran, dan pendidikan bagi seluruh rakyatnya.

Selama lima puluh tahun terakhir sudah banyak negeri merdeka yang mencoba menjalankan rencana besar pembangunan ekonomi mereka. Hampir semua rencana ini menemui kegagalan. Lihat saja keadaan dunia kita sekarang ini; kebanyakan negeri di Amerika Latin, Afrika, dan Asia bangkrut, terikat hutang pada bank-bank asing, dan hidup di bawah kendali IMF (International Monetary Fund, Dana Moneter Internasional).

Setelah berpuluh-puluh tahun merdeka rakyat di negeri-negeri tersebut masih hidup dalam kemiskinan dan ketimpangan antara mereka yang menikmati "pertumbuhan" ekonomi dan yang tidak. Indonesia, yang mencapai kemerdekaan pada 1949 [setelah penguasa kolonial Belanda resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, *Red*], dengan harapan tinggi tentang masa depan yang makmur, mengalami hal yang sama.

Kita harus menganalisis kegagalan-kegagalan ini dan mempelajari bagaimana caranya tidak mengulangi kesalahan begitu banyak kaum nasional dari negara-negara lain yang berusaha menciptakan pembangunan ekonomi di negeri-negeri bekas koloni.

Di bawah ini saya coba mengidentifikasi sejumlah hambatan terhadap lancarnya pembangunan ekonomi suatu negara dan mengemukakan secara singkat cara mengatasinya.

1. Hindari Pengeluaran Biaya Militer yang Terlalu Besar

Perhatikan Angola dan Moçambique yang memperoleh kemerdekaannya dari Portugal pada 1975 setelah melancarkan perang gerilya selama puluhan tahun. Kemerdekaan mereka membuat Amerika Serikat dan Afrika Selatan khawatir, sama dengan kemerdekaan Timor Lorosae mengkhawatirkan Indonesia. Kemerdekaan mereka dianggap merupakan "contoh buruk" bagi bangsa kulit hitam yang ditindas di Afrika Selatan.

Amerika Serikat dan Afrika Selatan segera membiayai kekuatan-kekuatan kontra revolusioner (UNITA [União Nacional de Independência Total de Angola] di Angola dan RENAMO [Resistencia Nacional de Moçambique] di Moçambique) untuk melakukan sabotase terhadap pembangunan ekonomi di negeri-negeri baru ini. Amerika Serikat mengulang model ini ketika sebuah gerakan nasionalis di Nicaragua, Front Pembebasan Nasional Sandinista (FSLN), menggulingkan kekuasaan diktator António Somoza yang didukung Amerika Serikat pada 1979. Amerika Serikat membiayai kelompok paramiliter *Contras* untuk menyerang Nicaragua dari Costa Rica dan Honduras, yaitu negeri-negeri sahabat Amerika Serikat.

Dengan membunuh orang sipil dan merusak infrastruktur (jalan, jembatan, tangki-tangki penyimpanan minyak, pelabuhan, dsb), akibat yang ingin ditimbulkan adalah memaksa negeri-negeri ini mengeluarkan banyak uangnya untuk membeli peralatan militer daripada untuk membiayai program-program kesejahteraan sosial bagi rakyat. Tujuan operasi sabotase semacam ini tidak lain untuk mencegah negeri-negeri bekas jajahan mencapai kemajuan ekonomi yang menguntungkan rakyatnya.

Pada saat ini (Desember 1999) pemerintah Indonesia tampaknya ragu-ragu untuk menyerang Timor Lorosae. TNI melalui pimpinan-pimpinan boneka kelompok milisi anti-kemerdekaan, mengancam akan melancarkan perang pada September dan Oktober. Ancaman ini ternyata omong besar belaka. Tetapi, pemerintah Indonesia mungkin saja mengubah kebijakannya di masa depan dan memulai kampa-

nye sabotase terhadap Timor Lorosae. Kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan seperti ini.

Menghadapi kemungkinan serangan semacam ini, pemerintah Timor Lorosae jangan sampai terprovokasi untuk membangun kekuatan militer dengan perlengkapan mutakhir yang mahal. Seorang Timor Lorosae terkemuka di luar negeri bertekad akan menjadikan Timor Lorosae seperti "Israel di Asia Tenggara". Inilah strategi bodoh yang oleh militer Indonesia diharapkan akan diambil bangsa Timor Lorosae. Timor Lorosae tak akan mampu membiayai proyek militerisasi serupa itu. (Perlu diketahui bahwa militer Israel hanya sanggup bertahan karena dibiayai oleh Amerika Serikat; Israel sendirian tak akan mampu membiayai militernya).

Bahaya lain militerisme terletak pada menguatnya militer sebagai suatu institusi dalam negara dan ikut menentukan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi negara. Militer akan mendominasi pemerintahan dan melampaui kepemimpinan sipil. Inilah yang sudah terjadi di Indonesia.

Timor Lorosae tidak membutuhkan kekuatan militer besar yang dilengkapi dengan persenjataan berteknologi canggih. Melihat ketahanan perang gerilya selama 24 tahun pendudukan Indonesia, negara manapun segan menduduki Timor Lorosae kembali dengan kekuatan militer. Ancaman harus terlibat lagi dalam perang berkepanjangan yang begitu mahal seharusnya cukup untuk mencegah Indonesia atau agresor potensial lainnya mencoba menduduki kembali Timor Lorosae.

Untuk mempertegas ancaman itu, sebaiknya FALINTIL dipertahankan sebagai tentara yang memang semata-

2. Hindari Pertumbuhan Ekonomi yang Digerakkan Ekspor, Kembangkan Pasar Domestik

Banyak negeri baru merdeka menjadi tergantung pada ekspor satu jenis aktivitas ekonomi. Di Timur Tengah dan Afrika Utara (lagi-lagi contohnya Aljazair), banyak negeri yang tergantung pada penghasilan dari penjualan minyak. Di Karibia, banyak negeri pulau kecil yang sepenuhnya hidup dari industri pariwisata dan perjudian.

Pendapatan minyak, khususnya, bisa membanjiri suatu negeri kecil dan mengakibatkan diabaikannya sektor-sektor ekonomi lainnya. Sebuah negeri bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan minyak, kemudian lupa akan perlunya mendiversifikasikan ekonominya. Kalau harga minyak turun, negeri tersebut tidak punya komoditi lain yang bisa diekspor dan tidak punya sistem perekonomian dalam negeri yang berdaya untuk mendukung rakyatnya. Untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa ini, sebuah negeri harus punya keragaman ekspor.

Di lain pihak, sebuah negeri juga tidak bisa hanya mengandalkan hasil ekspor untuk menggerakkan pertumbuhan ekonominya. Pasar dunia itu naik-turun dan berubah-ubah dengan kejam; harga naik dan turun tanpa bisa diramalkan. Kalau ekonomi suatu negara tergantung pada ekspor, pertumbuhan ekonomi dirugikan oleh perubahan naik-turun yang kejam ini. Tidak ada negeri industri maju yang hanya mengandalkan penghasilan ekspor untuk menggerakkan perekonomiannya.

Untuk mencapai suatu kemajuan ekonomi, sebuah negeri harus menciptakan perekonomian dalam negeri yang kuat. Negeri tersebut harus mempro-

Timor Lorosae tidak boleh lupa membangun sektor pertaniannya dan sektor-sektor industri kecil yang menghasilkan barang-barang untuk keperluan rakyat di dalam negeri.

dukasi banyak barang yang diperlukan rakyat pada umumnya. Produksi harus terutama diorientasikan pada pemenuhan pasar dalam negeri. Tentu saja, sebuah negeri sulit menghindari dari kegiatan ekspor dan impor, tetapi ia harus punya perekonomian dalam negeri yang kuat sebagai landasannya.

Negeri Timor Lorosae yang merdeka akan menghadapi bahaya bahwa perekonomiannya didominasi ekspor. Ia hanya memproduksi komoditi-komoditi yang akan mendatangkan banyak uang di pasar dunia: kopi, minyak, marmer, kayu cendana, dan melupakan produksi barang-barang kebutuhan dasar rakyat, seperti tekstil, bahan makanan, obat-obatan, dsb. Timor Lorosae mudah menjadi masyarakat yang memperoleh uang masuk dengan mengeksport barang dan mengimpor hampir seluruh kebutuhan konsumen dari Indonesia dan Australia. Untuk menghindari bahaya seperti ini Timor Lorosae tidak boleh lupa membangun sektor pertaniannya dan sektor-sektor industri kecil yang menghasilkan barang-barang untuk keperluan rakyat di dalam negeri. •

Meskipun Indonesia mungkin tidak mencoba menginvasi dan menduduki kembali Timor Lorosae, mereka mungkin akan melancarkan kampanye sabotase tingkat rendah – serbuan sporadis di wilayah perbatasan dengan NTT, pemboman, dan pembunuhan. Timor Lorosae mungkin perlu mempertahankan kehadiran kekuatan sipil PBB dalam jumlah kecil sebagai petugas pemantau di sepanjang perbatasan.

Jika tentara Indonesia kemudian melanggar perbatasan, mereka pasti akan mengklaim bahwa Timor Lorosae lah yang awalnya melakukan agresi ke wilayah Indonesia, sedangkan mereka hanya merespon saja. Para pemantau PBB akan bisa menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar.

Petani Timor Suarakan Aspirasi Anda

Majelis Konstituante belum mengadakan dengar pendapat tentang masalah petani. Sebaiknya para petani menyampaikan aspirasinya.

• • •

Sebagian terbesar rakyat Timor Lorosae hidup di pedesaan. Dengan mengolah tanah mereka bisa menopang kehidupan dan mengembangkan banyak hal yang lain. Kehidupan di pertanian itu telah dijalani selama berabad-abad, jauh sebelum kolonialisme Portugis hingga sekarang setelah masa pendudukan Indonesia usai. Di masa pemerintahan kolonial Portugis, kaum tani menjadi sasaran penindasan kolonial. Mereka diharuskan membayar pajak kepala (*imposto de capitacao*) dan pajak ternak serta diwajibkan bekerja untuk pemerintah. Mereka yang menolak akan dihukum dengan sangat kejam, seperti cambukan *palmatória*. Karena itu di masa kolonial sering terjadi pemberontakan kaum tani yang dipimpin oleh raja mereka seperti "Pemberontakan Dom Boaventura" (1910-1912).

Masa pendudukan Indonesia, kaum tani Timor Lorosae tetap menderita. Mereka tidak bebas bergerak karena

militer Indonesia memberlakukan surat jalan. Akibatnya para petani tidak bisa mengolah tanah di luar desa mereka. Tentara di pos BTT yang ada di setiap desa juga sering mengambil barang milik penduduk seperti ayam dan hasil pertanian. Tentara juga sering menghentikan mobil angkutan untuk mencari "GPK". Mereka dengan mudah mengambil begitu saja tanpa membayar. Akibatnya para petani yang pergi untuk menjual barang-barangnya di kota sering dirugikan. Kerugian sangat besar dialami para petani kopi ketika mereka diharuskan menjual kopi dengan harga yang sangat rendah kepada perusahaan milik pedagang dan komandan tentara dari Indonesia.

Di masa transisi ini, keadaan petani masih belum membaik. Para petani kopi masih banyak merugi, karena perusahaan asing membeli kopi dengan harga yang justru lebih rendah dibandingkan zaman Indonesia. Para petani juga sulit



Para petani di kebun: mati-hidup tergantung hasil kerja pertanian.

• • •

mengangkut hasil sawah-kebun karena tidak ada mobil angkutan.

Para petani berhak menikmati kemerdekaan. Mereka itu pada zaman perjuangan telah turut berjuang, dengan memberikan makanan, perlindungan dan bantuan lainnya kepada FALINTIL.

Namun sekarang ini justru nasib kaum tani menjadi terancam. Barang pertanian dari luar mulai memasuki Timor Lorosae. Sementara UNTAET yang bertanggungjawab mempersiapkan kondisi bagi pembangunan berkelanjutan malah tidak menyiapkan kebijakan pertanian yang bisa mempersiapkan para petani bersaing di pasar bebas. Padahal di lain pihak justru tampil pakar

ekonomi yang mengusulkan agar kita memasuki pasar bebas.

Sekarang ini, konstitusi Timor Lorosae sedang disusun. Para petani harus ambil bagian agar nasibnya tidak buruk terus. Karena itu, kami menyerukan agar para petani menyampaikan pemikiran mengenai bagaimana memajukan petani dan pertanian negeri kita. Lebih baik jika pemikiran tersebut merupakan hasil diskusi dengan rekan-rekan yang tinggal di aldeia atau suco Anda. Anda bisa menyampaikan aspirasi secara tertulis maupun berbicara langsung dengan para anggota Majelis. Pergunakanlah kesempatan ini baik-baik. Pintu Majelis terbuka bagi kita semua. •

• PROFIL •

António Ximenes

Kita harus menasionalisasikan produk lokal.

Lelaki berperawakan kecil itu pada zaman Portugis sempat mengikuti *Primaria Classe*. Pendidikan dasar dan menengah pertama dijalannya di Seminari Venilale dan menyelesaikan seminari menengah pada 1990 di Fatumaca. Setelah itu, anak dari pasangan Francisco Ximenes dan Francisca do Rego ini mengajar di Orfanato Venilale. Lalu melanjutkan ke seminari tinggi pada 1991-1997 di Seminari Tinggi Teologi Filsafat Pastoral (1991-1997) di Sulawesi Utara.

Tahun 1998 António ke Portugal untuk mendirikan partai UDC. "Pada saat itu orang beranggapan bahwa UDC adalah UDT, sehingga banyak anggota partai ini keluar. Karena dalam salah satu platvormnya Timor Lorosae akan federasi ke Portugal dan menjalankan misi Portugal di Timor Lorosae. Lalu saya mengubahnya dengan UDC/PDC. Sebelumnya saya sempat berkonsultasi dengan Vicente Guterres," katanya. Sebenarnya partai PDC didirikan bersama teman-temannya pada 1986 di Venilale. Pada saat itu bergerak secara klandestin dan baru dideklarasikan di Dili, 5 Agustus 2000.

Soal usulan konstitusi bersifat sementara, António menjawab, "Saya mengusulkan konstitusi bersifat definitif, dengan memuat bab amandemen dengan kriteria yang jelas. Saya juga



menyetujui transformasi Komisi Tematik ke parlemen nasional dengan jumlah anggota 65 seperti yang disetujui Komisi Tematik II. Jika diadakan pemilihan ulang akan membutuhkan dana besar, membuang waktu dan banyak tenaga."

"Saya tidak mengerti ekonomi. Ekonomi kerakyatan itu 'kan berhubungan dengan masyarakat bawah. Tetapi saya lebih melihat pada ekonomi pasar dalam konteks lokal, dimana masyarakat terlibat langsung di dalamnya. Misalnya, bagaimana menasionalisasikan kopi Ermera untuk dikonsumsi di negara kita, supaya tidak harus mengimpor kopi dari negara lain. Begitu juga dengan beras," kata lelaki kelahiran Ossu, 20 Agustus 1965 itu. •

José Marçal

Wakil rakyat yang presiden Partido do Povo de Timor (PPT) ini dilahirkan pada 15 Maret 1936 dengan nama Eduardo. Lelaki yang lahir di perbukitan Hatumera, Ainaro itu buah kasih pasangan Maria dan Francisco Xavier. Setelah dibaptis pada 1948 ia diberi nama Francisco Xavier. Ia kemudian dikenal sebagai Jacob Xavier.

Pendidikan dasar dijalani di Ainaro dan se usai Perang Dunia II, ia pindah sekolah di Soibada lalu melanjutkan ke seminari di Dare. Tahun 1963 ia menyelesaikan pendidikan Jurusan Sejarah Alkitab, pada Fakultas Filsafat Teologi Universitas Katolik Macau. Selanjutnya ia menjadi guru di Liceu Dr. Machado (1963-1965). Setelah berhenti sebagai guru ia menjadi Administrador de Posto di Luro, Lospalos. Jabatan ini ditinggalkan tahun 1967 karena ia menjalani pendidikan militer di Portugal. Pulang dari Portugal ia bertugas militer di Dili. Tahun 1970 ia ke Portugal lagi, satu tahun kemudian ditempatkan sebagai administrator di Angola.

Setelah Angola merdeka 1975 ia mengikuti program doktor teologi pada salah satu universitas Katolik di Lisboa. "Gelar doktor kepada saya diberikan oleh Dr. Jorge Miranda, penulis konstitusi Republik Portugal. Saat itu saya juga menulis beberapa buku mengenai hak konstitusi, hak sipil, dan hak administrasi," katanya. Ia juga menyusun

Dr. Jacob Xavier

Budaya Timor Harus Direfleksikan dalam Konstitusi.



tesis mengenai hak sipil yang dipertahankannya pada Universitas Coimbra. Sementara gelar doktor di bidang hukum Kanonik diperolehnya dari Universitas Katolik Macau (1991).

"Sewaktu menjabat *administrador do posto* saya sering melawan pemerintah Portugis dan raja-raja yang sering melakukan hukuman cambuk pada rakyat kecil," katanya. Sikap ini membuatnya dimusuhi oleh pemerintah dan sejumlah *liurai*.

Tentang isi konstitusi, budaya Timor di masa lalu harus direfleksikan di dalamnya, misalnya dengan mengakui eksistensi para *liurai*. •

Danino da Cunha